

**PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TANGGUNGPRIGEL TAHUN 2014**



**PEMERINTAH DESA TANGGUNGPRIGEL
KEC. GLAGAH KAB. LAMONGAN
2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA TANGGUNGPRIGEL**

PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGPRIGEL
TAHUN ANGGARAN 2014

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGUNGPRIGEL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Tanggungprigel Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGPRIGEL TAHUN ANGGARAN 2

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungprigel Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.008.545.500,- (Satu Milyard Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 929.460.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 687.004.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 242.456.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

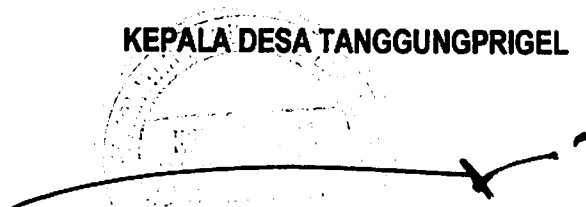
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanggungprigel
Pada tanggal 06 Mei 2014

KEPALA DESA TANGGUNGPRIGEL



MUHAMMAD HASHIF

Lampiran

: Peraturan Desa Tanggungprigel Kec. Glagah
Kab. Lamongan

Nomor

: 1 Tahun 2014

Tanggal

: 06 Mei 2014

Tentang

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tanggungprigel

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TANGGUNGPRIGEL KEC. GLAGAH KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	211,650,000	164,836,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	197,650,000	143,000,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :	193,150,000	138,500,000	
1.1.2.1.1	Bengkok Kepala Desa	41,000,000	45,000,000	
1.1.2.1.2	Bengkok Kaur Umum	8,500,000	8,500,000	
1.1.2.1.3	Bengkok Kaur Keuangan	8,500,000	8,500,000	
1.1.2.1.4	Bengkok Kasi Pemerintahan	12,600,000	10,000,000	
1.1.2.1.5	Bengkok Kasi Ekbang	8,500,000	8,500,000	
1.1.2.1.6	Bengkok Kasi Kesra	8,250,000	7,000,000	
1.1.2.1.7	Bengkok Kasun Tanggungan	8,500,000	8,500,000	
1.1.2.1.8	Bengkok Kasun Prigelan	8,300,000	7,500,000	
1.1.2.1.9	Bengkok Kyai	8,000,000	8,000,000	
1.1.2.1.10	Bengkok Modin	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.11	Tanah Kas Desa 1 (Suguh Dayoh)	3,500,000	4,500,000	
1.1.2.1.12	Tanah Kas Desa 2 (Ex bgk. Kaur Umum)	11,650,000	10,000,000	
1.1.2.1.13	Tanah Kas Desa 3 (Ex bgk. Ks. Tramtib)	13,750,000	10,000,000	
1.1.2.1.14	Tanah Kas Desa 4 (Telaga Minum)	-	500,000	
1.1.2.1.15	Tanah Kas Desa 5 (Sisa TPA)	-		
1.1.2.1.16	Tanah Kas Desa 6 (Ex Bgk. Sekdes)	50,100,000	-	2 Tahun
1.1.2.2	Lain-lain Kekayaan Desa :	500,000	500,000	
1.1.2.2.1	Hasil sewa pompa air 6D	500,000	500,000	
1.1.2.3	Dana cadangan APBDes tahun lalu	4,000,000	4,000,000	Tahun 2013
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :	3,000,000	7,036,000	
1.1.3.1	Swadaya masy. dlm. Pembangunan	3,000,000	7,036,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong :	3,000,000	3,000,000	
1.1.4.1	Nilai kerja bakti masyarakat	3,000,000	3,000,000	
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah :	8,000,000	11,800,000	
1.1.5.1	Prosentase jual beli	-	1,000,000	
1.1.5.2	Hasil biaya registrasi walimah	250,000	350,000	

1	2	3	4	5
1.1.5.3	Bagian biaya adm. Kependudukan	250,000	250,000	
1.1.5.4	Retribusi sampah	7,500,000	10,200,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	2,400,000	2,400,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	1,300,000	1,300,000	
1.2.2	UP PBB	1,100,000	1,100,000	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	55,500,000	55,500,000	
1.4.1	ADD	44,500,000	44,500,000	
1.4.2	Bansun 2 Dusun	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pem., Provinsi, Kab./Kota, dan Desa Lainnya	1,198,209,000	601,524,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :	74,159,000	107,674,000	
1.5.1.1	Pelengsengan PNPM-MP	74,159,000	107,674,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Provinsi :	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Kab./Kota :	1,124,050,000	493,850,000	
1.5.3.1	Jalan Poros Desa (Rabat Beton)	30,000,000	40,000,000	
1.5.3.2	Pelengsengan Jalan Poros Desa PAK	-		
1.5.3.3	Pengadaan Air Bersih	168,000,000		
1.5.3.4	Pembangunan Jalan Poros Hot Mix	776,000,000	400,000,000	
1.5.3.5	Pelengsengan Jalan Produksi	90,000,000	-	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Kades	5,000,000	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Kasun Prigelan	2,000,000	-	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bakti 7 Anggota BPD	3,500,000	-	
1.5.3.9	Bantuan Biaya Pilkades	6,500,000	-	
1.5.3.10	TPAPD :	38,400,000	49,200,000	
1.5.3.10.1	Tunj. Pengh. Kepala Desa	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.10.2	Tunj. Pengh. Kaur Umum	7,200,000	9,600,000	
1.5.3.10.3	Tunj. Pengh. Kaur Keuangan	7,200,000	9,600,000	
1.5.3.10.4	Tunj. Pengh. Kasi Ekbang	7,200,000	9,600,000	
1.5.3.10.5	Tunj. Pengh. Kasun Tanggungan	7,200,000	9,600,000	
1.5.3.10.6	Tunj. Pengh. Kasun Prigelan	-	-	
1.5.3.10.7	Tunj. Pengh. Kasi Kesra		-	
1.5.3.11	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.12	Tunj. Pengh. Ketua BPD	600,000	600,000	
1.5.3.13	Tunj. Pengh. BPD Wakil Ketua	550,000	550,000	
1.5.3.14	Tunj. Pengh. BPD (5 anggota)	2,500,000	2,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	3,000,003	105,200,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah :	3,000,003	105,200,000	
1.6.3.1	Bantuan SLPTT (Poktan)	3,000,000	5,200,000	

1	2	3	4	5
1.6.3.2	Bantuan PUAP	-	100,000,000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	33,500,000	-	
	Sumbanga pihak ketiga calon Kades	33,500,000		
1.7.1	Sumbanga pihak ketiga calon Kasi Kesra	-		
1.7.2	Sumangan pihak ketiga calon Kasun	-		
JUMLAH PENDAPATAN		1,504,259,003	929,460,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	1,263,024,500	687,004,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :	67,570,000	81,430,000	
2.1.1.1	Honor Timlak ADD	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.2	Honor Panitia lelang	1,300,000	1,300,000	
2.1.1.3	Honor 7 Modin Perempuan	1,450,000	1,450,000	
2.1.1.4	Honor Penjaga Dam	1,200,000	1,200,000	
2.1.1.5	Honor Petugas Kebersihan	7,500,000	10,200,000	
2.1.1.6	Upah pungut PBB	1,100,000	1,100,000	
2.1.1.7	Tunjangan Pengh. Aprt. Pemdes :	39,900,000	50,700,000	
2.1.1.7.1	Tunj. Pengh. Kepala Desa	9,600,000	10,800,000	
2.1.1.7.2	Tunj. Pengh. Kaur Umum	7,200,000	9,600,000	
2.1.1.7.3	Tunj. Pengh. Kaur Keuangan	7,200,000	9,600,000	
2.1.1.7.4	Tunj. Pengh. Kasi Ekbang	7,200,000	9,600,000	
2.1.1.7.5	Tunj. Pengh. Kasi Kesra			
2.1.1.7.6	Tunj. Pengh. Kasun Tanggungan	7,200,000	9,600,000	
2.1.1.7.7	Tunj. Pengh. Kasun Prigelan	-		
2.1.1.7.8	Tunj. Kinerja Sekretaris Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.8	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.9	Tunjangan Penghasilan BPD :	8,440,000	8,440,000	
2.1.1.9.1	Tunj. Pengh. Ketua	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.9.2	Tunj. Pengh. Wakil Ketua	1,270,000	1,270,000	
2.1.1.9.3	Tunj. Pengh. Sekretaris	1,270,000	1,270,000	
2.1.1.9.4	Tunj. Pengh. 4 anggota	4,400,000	4,400,000	
2.1.1.10	Uang Kehormatan LKD :	4,680,000	5,040,000	
2.1.1.10.1	Uang Kehormatan 4 Ketua RW	480,000	600,000	
2.1.1.10.2	Uang Kehormatan 12 Ketua RT	4,200,000	4,440,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :	1,191,454,500	601,574,000	
2.1.2.1.	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat :	5,370,000	3,400,000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Rutin	2,400,000	2,400,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Temporer	2,970,000	1,000,000	
2.1.2.2	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	4,705,000		

1	2	3	4	5
2.1.2.3	Belanja Bahan/Material :	1,181,379,500	598,174,000	
2.1.2.3.1	Belanja ATK, Foto Copy dan Format	5,723,500	1,500,000	
2.1.2.3.2	Belanja pembangunan jalan poros desa	30,000,000	40,000,000	
2.1.2.3.3	Belanja pembangunan jalan poros(PAK)			
2.1.2.3.4	Belanja pembangunan Balai Desa	5,281,000	5,000,000	
2.1.2.3.5	Belanja Pemb. Jl. Alternatif (ADD)	20,126,000	22,000,000	
2.1.2.3.6	Belanja Bangsun Tanggungan	5,950,000	5,500,000	
2.1.2.3.7	Belanja Bangsun Prigelan	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.3.8	Belanja Perbaikan Jalan Makam	640,000	1,000,000	
2.1.2.3.9	Belanja Pengadaan Air Bersih	168,000,000	10,000,000	
2.1.2.3.10	Belanja Pemb. Jalan Poros Hot Mix	776,000,000	400,000,000	
2.1.2.3.11	Belanja Pemb. Jalan Produksi	90,000,000	-	
2.1.2.3.12	Belanja Pembangunan Pelengsengan (PNPM-MP)	74,159,000	107,674,000	
2.1.3	Belanja Modal :	4,000,000	4,000,000	
2.1.3.1	Cadangan APBDes Tahun berikutnya (2015)	4,000,000	4,000,000	
	2.2 Belanja Tidak Langsung	241,234,503	242,456,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	113,000,000	89,000,000	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Kepala Desa	41,000,000	45,000,000	
2.2.1.2	Belanja penghasilan Kaur Umum	8,500,000	8,500,000	
2.2.1.3	Belanja penghasilan Kaur Keuangan	8,500,000	8,500,000	
2.2.1.4	Belanja Penghasilan Kasi Ekbag	8,500,000	8,500,000	
2.2.1.5	Belanja Penghasilan Kasi Kesra			
2.2.1.6	Belanja penghasilan Kasun Tanggungan	8,500,000	8,500,000	
2.2.1.7	Belanja penghasilan Kasun Prigelan			
2.2.1.8	Belanja penghasilan Kyai	8,000,000	8,000,000	
2.2.1.9	Belanja penghasilan Modin	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.9	Purna Bakti Kepala Desa	16,500,000	-	
2.2.1.10	Purna Bakti Kasun Prigelan	4,500,000	-	
2.2.1.11	Purna Bakti 7 Anggota BPD	7,000,000	-	
2.2.2	Belanja Hibah	3,000,000	105,200,000	
2.2.2.1	Belanja Bantuan SLPTT	3,000,000	5,200,000	
2.2.2.2	Bantuan PUAP		100,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :	8,000,000	8,000,000	
2.2.3.1	Belanja bantuan renovasi masjid	8,000,000	8,000,000	
2.2.3.2	Belanja santunan anak yatim			
2.2.4	Belanja Lain-lain :	103,627,503	25,720,000	
2.2.4.1	Belanja operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.2	Belanja operasional Pemerintah Desa	13,634,500	4,500,000	
2.2.4.3	Belanja operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Belanja operasional PKK	3,000,000	3,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.4.5	Belanja operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Belanja operasional Posyandu	500,000	1,000,000	
2.2.4.7	Belanja kegiatan HUT RI	1,305,000	1,500,000	
2.2.4.8	Belanja Tunjangan Hari Raya	5,060,000	5,500,000	
2.2.4.9	Belanja BU ADD 5%	1,500,000	2,500,000	
2.2.4.10	Membayar devisit Tahun sebelumnya	37,548,000	-	
2.2.4.11	Pemeliharaan sarana prasarana desa	1,080,000	720,000	
2.2.4.12	Lomba LGC		500,000	
2.2.4.13	Perlengkapan Taman Posyandu	-		
2.2.4.14	Belanja Pemilihan Kepala Desa	33,500,000	-	
2.2.4.15	Belanja Pengangkatan Kasun Prigelan	-		
2.2.4.16	Belanja Pengangkatan Kaur Kesra	-		
2.2.5	Belanja Tak Terduga :	13,607,000	14,536,000	
2.2.5.1	Bencana alam	300,000		
2.2.5.2	Nilai kerja bakti masyarakat	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.3	Swadaya pembangunan	3,000,000	7,036,000	
2.2.5.4	Belanja Tak Terduga Lainnya	7,307,000	4,500,000	
	JUMLAH BELANJA	1,504,259,003	929,460,000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	00,-	00,-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun	00,-	00,-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang	00,-	00,-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	00,-	00,-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	00,-	00,-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	00,-	00,-	
3.2.2	Penyertaan modal desa	00,-	00,-	
3.2.3	Pembayaran utang	00,-	00,-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	00,-	00,-	

Kepala Desa Tanggungprigel

MUHAMMAD HASHIF



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANGGUNGPRIGEL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANGGUNGPRIGEL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TANGGUNGPRIGEL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENJADI
PERATURAN DESA GLAGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGPRIGEL

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam peraturan desa dengan persetujuan yang tertuang pada Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tanggungprigel.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999, tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
 4. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 31 Tahun 2000, tentan Badan Permasyarakatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Bandan Permasyarakatan Desa;
 6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 40 Tahun 2001, tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
 7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 51 tahun 2001, tentang pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 8. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Glagah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Glagah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tanggungprigel Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
 2. Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan Desa sebagai Produk Hukum bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / di sahkan.

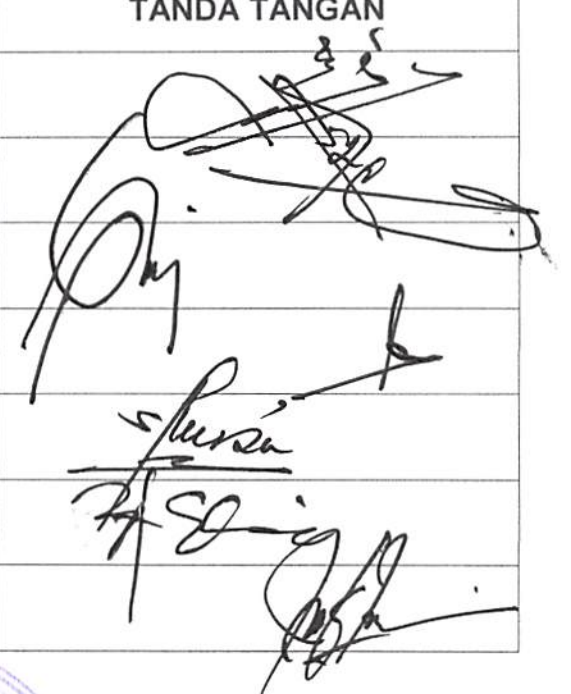
Ditetapkan di Desa Tanggungprigel
Pada tanggal : 06 Mei 2014.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Tanggungprigel.



MOH. MACHIM, S.Pd.I.

Daftar : Hadir Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tanggunprigel dalam rangka pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tanggunprigel Tahun 2014
Tanggal : 06 Mei 2014

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moh. Machim, S.Pd.I	KETUA	
2	Drs. Abdul Hamid	WK. KETUA	
3	Badrit Tamam, SE.	SEKRETARIS	
4	Ahzab	ANGGOTA	
5	Sya'roni Luthfi	ANGGOTA	
6	Moh. Sholeh	ANGGOTA	
7	Drs. Zainal Arifin	ANGGOTA	



Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Tanggunprigel.

MOH. MACHIM, S.Pd.I.